



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUHARIYANTO
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 632907

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 925.000.000

1. Tanah Seluas 95 m2 di KAB / KOTA SAMPANG, LAINNYA Rp. 325.000.000
2. Tanah Seluas 123 m2 di KAB / KOTA KOTABARU, WARISAN Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 312.000.000

1. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
2. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
3. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOTOR, YAMAHA BEBEK Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
5. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2013, LAINNYA Rp. 110.000.000
6. MOBIL, IZUZU DUMPTRUK Tahun 2012, LAINNYA Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 8.550.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.245.550.000



III. HUTANG

Rp.

30.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.215.550.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : INSIYATUN
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 656315

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.100.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 6 m ² /3 m ² di KAB / KOTA SAMPANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 2 m ² /2 m ² di KAB / KOTA SAMPANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 900.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	370.000.000
1. MOTOR, HONDA BEBEK/CV 150 R Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA INOVA VENTURE 2,4 AT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	92.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	27.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	30.700.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	17.000.000
Sub Total	Rp.	1.636.700.000
III. HUTANG	Rp.	70.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.566.700.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **LUDDIN**
2. Jabatan : **ANGGOTA**
3. NHK : **637296**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **820.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 25 m²/15 m² di KAB / KOTA SAMPANG, WARISAN Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 35 m²/30 m² di KAB / KOTA SAMPANG, WARISAN Rp. 270.000.000
3. Tanah Seluas 1.200 m² di KAB / KOTA SAMPANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **13.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **31.000.000**

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. **864.000.000**

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **864.000.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHALLI
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 632958

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.407.000.000

1. Tanah Seluas 77 m2 di KAB / KOTA BANGKALAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 3.500 m2 di KAB / KOTA SAMPANG, WARISAN Rp. 2.007.000.000
3. Tanah Seluas 750 m2 di KAB / KOTA SAMPANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 51.500.000

1. MOTOR, YAMAHA NMIX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000
2. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 27.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 150.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 2.458.650.000

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.458.650.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUNUS ALI GHAFI
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 632875

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	500.000.000
1. Tanah Seluas 219 m2 di KAB / KOTA SAMPANG, WARISAN Rp. 500.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	10.000.000
1. MOTOR, ZUSUKI BEBEK Tahun 2013, LAINNYA Rp. 6.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA BEBEK Tahun 2011, LAINNYA Rp. 4.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	2.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.650.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	514.650.000
III. HUTANG	Rp.	127.700.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	386.950.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.